LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK
(LKPD)

Tahun Pelajaran : 2021/2022
Kelas/ Semester : XI/ Genap
Mata Pelajaran : Ekonomi
Materi Pokok : APBN dan APBD

Nama peserta didik : .....
Kelas : .....
Kode LKPD :

Petunjuk:

1. Baca bahan bacaan/materi tentang APBN dan APBD dagang dengan cermat
2. Jawablah pertanyaan pada lembar TTS dengan benar

JAWABLAH TTS BERIKUT DENGAN BENAR

TTS EKONOMI APBN

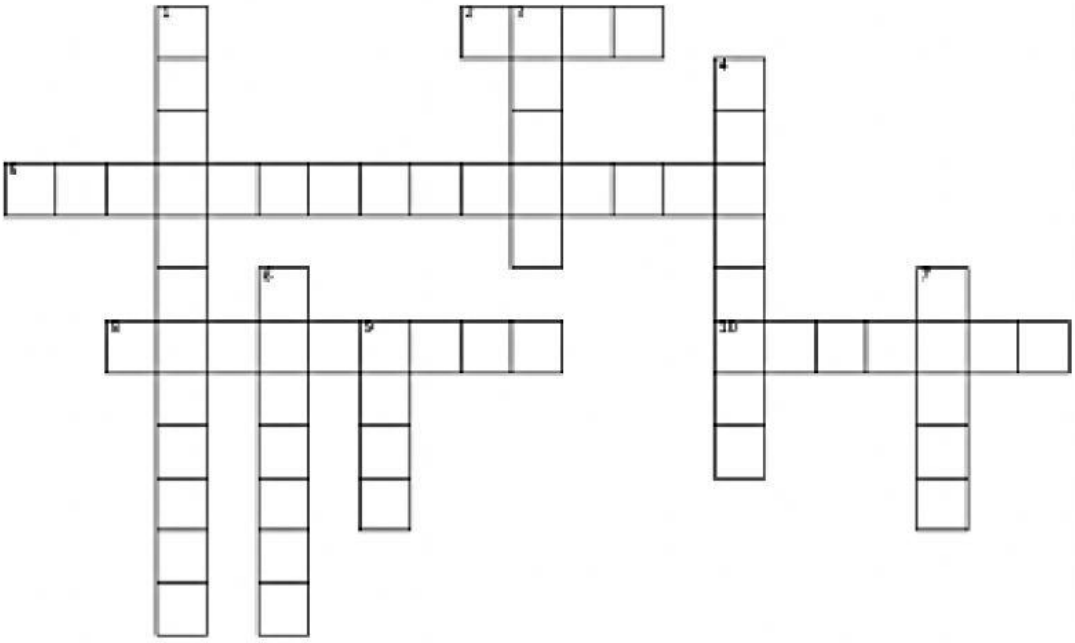

ACROSS

2. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD
5. Salah satu penerimaan pemerintah daerah
8. Masa berlakunya APBN/APBD
10. Salah satu fungsi APBN

DOWN

1. Salah satu belanja rutin negara
3. Salah satu sumber pendapatan negara dari dalam negeri
4. Salah satu jenis belanja pemerintah daerah
6. Anggaran dimana jumlah penerimaan lebih besar dari pengeluaran
7. APBN yang baru diusulkan oleh eksekutif
9. Rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR

LIVEWORKSHEETS

MATERI

LIVEWORKSHEETS

Pengertian APBN

adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan APBN

1. **Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.**
2. **Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.**
3. **Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.**
4. **Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal.**
5. **Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja**

Fungsi APBN

Fungsi alokasi	• Anggaran negara dialokasikan untuk mengurangi pengengguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonmian negara
Fungsi distribusi	• Anggaran digunakan Negara membuat kebijakan dengan adil dan bijaksana
Fungsi otorisasi	• Anggaran negaramenjadi pedoman pemcapaian target penerimaan negara
Fungsi perencanaan	• Anggaran negara menjadi dasar bagi manajemendalam merencanakan anggaran tahun bersangkutan
Fungsi pengawasan	• Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilaiapakan kegiatan penerimaan dan pengeluarn negara sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan
Fungsi stabilisasi	• Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perknomian

LIVEWORKSHEETS

Mekanisme penyususnan APBN

Berdasarkan bagan di atas APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) **Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis**
2) **Pengajuan RAPBN oleh Pemerintah kepada DPR**
3) **Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang**
4) **Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang,**
5) **jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya**
6) **APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.**

Asas penyusunan APBN

- Kemandirian: peningkatan penerimaan dalam negeri
- Penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas
- Penjaman perioritas pembangunan

Prinsip penyusunan APBN

a) Berdasarkan aspekpendapatan

- Mengidentifikasikan peneriimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran
- Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara
- Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita negara

b) Berdasarkan aspek engeluaran

- Efektif dan efisien serta sesuaidengan kebuthan teknisyang ada
- Terarah dan terkendali sesuai anggaran dan program kegiatan
- Menggunakan semaksimal mungkin produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki

LIVEWORKSHEETS

- **Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:**

  Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:

  1) Penerimaan Perpajakan, terdiri atas
     a) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
     b) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
  2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
     a) Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
     b) Bagian Laba BUMN
     c) PNBP lainnya

Belanja terdiri atas dua jenis:

1) **Belanja Pemerintah Pusat**, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2) **Belanja Daerah**, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
   a) Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumber daya lainnya.
      Dana bagi hasil pajak: PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi.
   b) Dana Alokasi Umum, yaitu dana berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
   c) Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang berasal APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantgu membiayai kebutuhan tertentu.
   d) Dana Otonomi Khusus.

3). Pembiayaan meliputi:

a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

b. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
   1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
   2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

LIVEWORKSHEETS

Kebijakan-Kebijakan Anggaran

- **Kebijakan Fiskal Seimbang**

  merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

- **Kebijakan Fiskal Surplus**

  pada kebijakan ini jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.

- **Kebijakan Fiskal Defisit**

  merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit.

- **Kebijakan Fiskal Dinamis**

  kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

Dewi Noor Sani

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

1. Di sini dapat di ketahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
2. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat di atur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga
3. Industri - industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi.
4. Bisa di ketahui sumber penerimaan dan penggunaan untk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan.
5. Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

BAB 4,SESI 2

APBD

LIVEWORKSHEETS

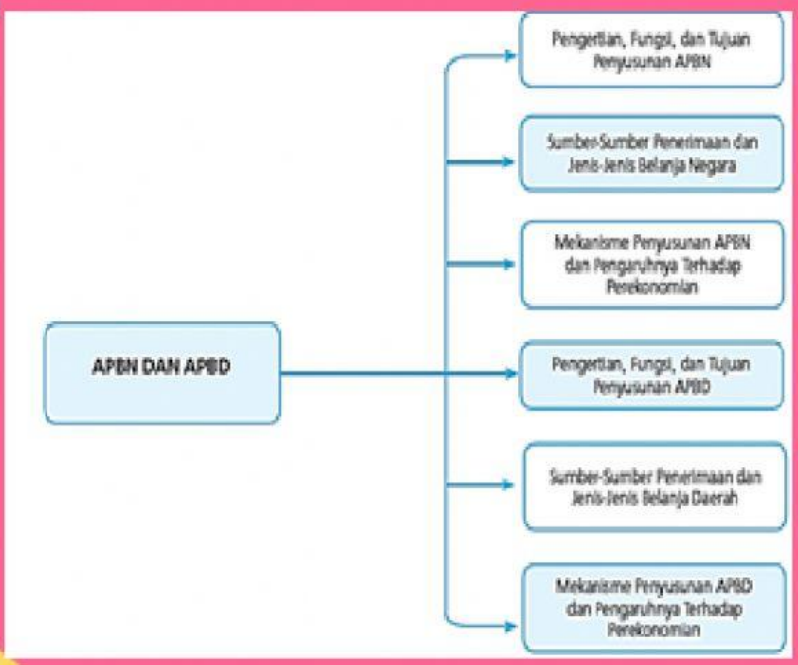

Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja di antaranya:

a. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
b. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
c. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
d. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah

LIVEWORKSHEETS

Mekanisme Penyusunan APBD

Mekamisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
4. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
5. Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran
6. APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi

Komponen APBD

APBD	2011	2012	2013
Pendapatan	***317,164***	***403,048***	***442,205***
Pendapatan Asli Daerah	87,487	71,832	87,647
- Pajak Daerah	45,126	47,682	62,162
- Retribusi Daerah	7,850	8,035	7,837
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3,420	3,637	4,845
- Lain-lain PAD yang Sah	11,271	12,498	18,804
Dana Perimbangan	225,288	285,381	302,264
- Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi Hasil Bukan Pajak	80,768	77,877	71,934
- Dana Alokasi Umum	137,106	183,226	207,881
- Dana Alokasi Khusus	18,002	24,318	22,450
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44,431	35,898	52,297
- Hibah	2,309	4,248	3,408
- Dana Darurat	533	377	285
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	11,063	11,081	13,113
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,852	15,407	29,845
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	2,242	4,955	5,185
- Lain-lain	6,814	1,871	2,015
Belanja	***353,100***	***443,565***	***474,185***
Belanja Tidak Langsung	212,449	241,573	251,428
- Belanja Pegawai	181,064	174,761	251,461
- Belanja Bunga	316	187	170
- Belanja Subsidi	602	631	708
- Belanja Hibah	12,265	10,373	14,437
- Belanja Bantuan Sosial	26,768	11,517	10,603
- Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4,487	13,578	14,834
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	5,213	30,797	30,719
- Belanja Tak Terduga	837	1,735	2,573
Belanja Langsung	140,651	201,992	222,689
- Belanja Pegawai	7,569	23,910	22,105
- Belanja Barang dan Jasa	28,633	81,008	84,082
- Belanja Modal	104,735	98,175	106,207
Pembiayaan	***35,186***	***40,487***	***33,370***
Penerimaan	74,408	48,091	41,181

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
   - Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
   - Retrebusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   - Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

b. Dana Perimbangan
   - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
   - Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
   - Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain ebagainya

c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah
   - Pendapatan Hibah

LIVEWORKSHEETS

Belanja Daerah

a. **Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas :

- Belanja Pegawai yang meliputi meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

b. **Belanja Langsung**

Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari *beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.*

Pengaruh APBD Terhadap Pembanguan Ekonomi Sebagai Berikut :

a. mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
b. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.
c. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
d. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD

LIVEWORKSHEETS